BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia, hal tersebut terdapat juga dalam falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila jika kita menganalisis maka semua sila dalam Pancasila mengandung penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, Adapun Hak Asasi Manusia menurut para ahli adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawaannya bersamaan dengan kelahiran atau kehidupannya di dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, dan karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Di Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup,

yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan seterusnya. Sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja di pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang *pluralistic*.¹

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bila mana tidak ada masyarakat atau orang maka tentu tidak akan ada hukum . Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Keberadaan hukum sebagai kaidah atau norma sosial sangatlah penting untuk menyatukan perbedaan sudut pandang dan perbedaan pola-pola perilaku yang berlaku di masyarakat.

Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik dari pada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum

¹ M. Ryan Syahbana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, tt.p, 2013

yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering di lontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat di beli, yang mempunyai jabatan, nama dan kekuasaan, yang punya uang banyak pasti aman dari gangguan hukum walau aturan negara di langar. Ada pengakuan di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli maka aparat penegak hukum tidak dapat di harapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil.

Sejauh ini hukum tidak saja di jalankan sebagai rutinitas belaka tetapi juga di cerminkan seperti barang dagangan. Hukum yang seharusnya menjadi alat pembaharuan masyarakat, telah berubah menjadi semacam mesin pembunuh karena di dorong oleh seperangkat hukum yang tidak jelas.

Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum seperti mafia hukum di peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang di temui dalam penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka cara berfikir masyarakat serta paham-paham di dalam masyarakat tumbuh dan berkembang, setiap individu maupun kelompok mempunyai keinginan dan kepentingan masing-masing yang perlu di suarakan dan atau di dengarkan bersama sebagai bentuk demokrasi yang di anut oleh negara kita. hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hal ini di dasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang di cita-citakan oleh

masyarakat dibutuhkan kaidah-kaidah (Hukum) sebagai alatnya.² Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, dan karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Di Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Dimasukannya ketentuan ini ke dalam bagian Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Dalam perkembangannya sistem kemasyarakatannya akan berjalan normal sampai ada peristiwa yang dianggap mengancam sistem kemasyarakatan seperti ketidakadilan, diskriminasi dan seterusnya. Sebagai salah satu cara ungkapan rasa tidak puas, masyarakat menempuh cara demonstrasi atau unjuk rasa. Aksi unjuk rasa seharusnya bukan saja di pandang sebagai ekspresi masyarakat yang wajar melainkan juga sebagai

² M. Ryan Syahbana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, tt.p, 2013

indikator penerapan “prinsip demokrasi” dalam kehidupan masyarakat yang pluralistic.³

Didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁴ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan pengamanan pada saat unjuk rasa.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik dan kepentingan kelompok unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah.

Seperti kasus yang peneliti kaji, mengenai unjuk rasa dan tindakan represif anggota Polri kepada mahasiswa di lingkungan kampus Universitas Islam Bandung kota Bandung. Pada tanggal 23 dan 24 September 2019 terjadi unjuk

³ M. Ryan Syahbana, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, tt.p, 2013

⁴ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 23.

rasa oleh mahasiswa. Namun, anggota Polri melakukan tindakan represif dan menyerang mahasiswa di lingkungan kampus kota Bandung.

Aparat penegak hukum yang berlangsung berhadapan dengan mahasiswa dalam unjuk rasa adalah kepolisian. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, sikap Polri dalam menghadapi unjuk rasa harus disiplin tanpa melibatkan emosi. Dalam kenyataannya beberapa tindakan Polri dalam menangani unjuk rasa dilakukan secara represif. Seperti di kota Bandung yang mana pihak kepolisian menerobos masuk kedalam lingkungan kampus kota Bandung untuk menghadang para mahasiswa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam dengan judul: "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI DI LINGKUNGAN KAMPUS KOTA BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**".

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dalam penanganan demonstrasi di lingkungan kampus kota Bandung?
2. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan dalam penanganan demonstrasi di lingkungan kampus Kota Bandung?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan kekerasan dalam penanganan demonstrasi oleh aparat Kepolisian kepada Mahasiswa di lingkungan kampus Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dalam penanganan demonstrasi di lingkungan kampus kota Bandung.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang faktor-faktor aparat Kepolisian melakukan tindakan kekerasan dalam penanganan demonstrasi di lingkungan kampus Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindakan kekerasan dalam penanganan demonstrasi oleh aparat Kepolisian kepada Mahasiswa di lingkungan kampus Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai penegakan hukum terhadap aparat kepolisian yang melakukan kekerasan dalam penanganan demonstrasi mahasiswa di lingkungan kampus.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi maupun akademis dalam menentukan kedudukan, upaya dan perlindungan masa demonstrasi, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan serta bahan pengembangan bagi pihak Kepolisian Republik Indonesia, agar lebih memahami tugas dan wewenang kepolisian dalam penanganan demonstrasi mahasiswa di lingkungan kampus.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh Undang-Undang Tahun 1945.⁵

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

“.....Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

⁵ Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta, 2010, hlm. 57.

Merujuk pada konsep hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Aturan hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua masyarakat harus menataati hukum tanpa kecuali.

Hukum sebagai rangkaian kaidah atau norma, peraturan-peraturan, tata urutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa:⁶

“Hukum dalam masyarakat diharapkan mampu sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum dalam konsepsi ini diasumsikan sebagai kaidah atau peraturan hukum dan norma hukum yang dapat berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang di khendaki. Hukum juga menstrukturkan seluruh proses, sehingga ketertiban, kepastian dan penegakan hukum menjadi tercapai”.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 9.

Konsekuensinya di negara hukum, tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Dipertanggungjawabkan saja dapat dijatuhi pidana atau tindakan.⁷ Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.⁸

Berbicara mengenai negara hukum, negara hukum memiliki ciri sebagai berikut:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan Negara dibatasi oleh hukum.
2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparatnya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang memuat peraturan perundang-undangan yang membuat peraturan perundang-

⁷ Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kertagama Publising*, Jakarta, 2007, hlm. 36.

⁸ Andi Hamzah, Edit, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 75.

undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.⁹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum.

Sebagaimana Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas pokok Polri adalah:

1. Memelihara Keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan
4. Pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang Kepolisian, adanya tugas bagi Kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dalam proses penegakan hukum atau menjalankan perintah dari Undang-Undang. Dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian harus memiliki dan mencerminkan sikap yang baik, bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggungjawab anggota Kepolisian Negara Republik

⁹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm 18.

Indonesia harus dijalankan secara professional, proposional, dan procedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut.

Seorang anggota Polri jika melakukan pelanggaran harus menghadapi 3 (tiga) proses persidangan, yaitu Sidang Disiplin dan Sidang Kode Etik serta Peradilan Umum dalam hal ini perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan bahwa:

“Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.”

Artinya bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian diselesaikan dalam lingkup peradilan umum. Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional peradilan umum bagi Anggota POLRI.

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya itu telah diatur dalam undang-undang dan begitu pula KUHPidana Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHPidana disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Menurut Van Bemmelen istilah perbuatan pidana yaitu:

“Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.”

Terkait mengenai tindak pidana penganiayaan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan asas legalitas karena tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 yang berbunyi :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan Penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

F. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh peneliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian

menganalisanya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹¹

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:¹²

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

¹¹ *Ibid*, hlm. 11.

¹² *Ibid*, hlm. 11.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹³ terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen IV Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
 - 4) Peraturan Polri Nomor 16 Tahun 2006
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh penulis.¹⁵

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁵ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.¹⁶

Contohnya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) *Black's Law Dictionary*;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Internet;
- 5) dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Penanganan Aparat Kepolisian mengenai Pengendalian masa.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian itu, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder dilakukan dengan

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan pihak Kepolisian.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan dengan Penanganan Aparat Kepolisian mengenai Pengendalian masa. Alat yang dipergunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis kepada pihak Kepolisian Polrestabes Kota Bandung.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai Hukum Positif. Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan

asas-asas dan informasi,¹⁷ tentang dengan Penanganan Aparat Kepolisian mengenai Pengendalian masa.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di:

- 1) Profesi dan Pengamanan (Profam) Polisi Daerah Jawa Barat.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Huium Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 52.